

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Zainudin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika
- Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group
- Ani Purwati. 2020 *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing
- Bagir Manan, 2004, *Teori dan Politik Konstitusi*, UII Press
- Bastian, Indra.2006 *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*,: Erlangga
- Budi Juliardi, dkk 2023. *Metode Penelitian Hukum.*, Gita Lentera
- Dina Susianti, 2025 “*Hukum Pemerintahan Daerah*”, Tahta Media Group
- E. Utrecht, 1989, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru
- H A W Widjaja, 2025 *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*,: PT Raja Grafindo Persada
- Hadi, M. 2020, *Hukum Lalu Lintas dan Administrasi Kendaraan Bermotor di Indonesia*.: Sinar Grafika.
- Irfan Setiawan, 2018 *Handbook Pemerintahan Daerah* (WR)
- Maria Farida Indrati S., 2014, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Cet. 15, Kanisius
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Bandar lampung.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu
- Philipus M. Hadjon, 2002 *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Pres
- Peter Mahmud Marzuki.2005 *Penelitian Hukum*. Edisi I. Prenadamedia Group
- Peter Mahmud Marz uki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana
- Ridwan HR, 2020, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers
- Ronni Hanitijo Soemitro, 1994 *Metode Penelitian Hukum Dan Jumetri*, Ghalia Indonesia
- Soekanto, Soerjono, 2019, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-16, PT RajaGrafindo Persada
- Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Cahaya

Atma Pustaka

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Kepolisian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

C. Skripsi, Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah Lainnya

Agustinus Hendy Kristiawan, dkk, 2020 *"Efektivitas Pasal 71 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terkait Wajib Laport Kendaraan Bermotor Luar Wilayah"* (Studi di Kantor Bersama Satuan Manunggal Satu Atap Kota Malang), Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang

Atmaja, Dewa Gede, 2018, *"Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum"*, Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 12 No. 2

A. M. Hsb, 2019, *"Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah"*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16 No. 2

Ayandra Kezia Kasihnami, 2025 *Kewenangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam Mengatur Pengguna Kendaraan Bermotor Termodifikasi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

(Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Trisakti).

- Akbar Azis Julitanto & A. Basuki Babussalam, 2026, *"Pertanggungjawaban Hukum Pengendara Kendaraan Bermotor dengan Plat Nomor yang Dimodifikasi"*, Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 1
- Darman, I Komang, 2019, *"Akibat Hukum Perbuatan Aparat Pemerintah yang Tidak Sah Dalam Melaksanakan Pemerintahan"*, Jurnal Belom Bahadat, Vol. 7 No. 2
- Edyanti, Y., 2022, *"Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad): Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintahan"*, Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Vol. 2 No. 2
- Efendi, 2024, *"Tindakan Ultra Vires Organ Pemerintahan dan Konsekuensi Hukumnya"*, Masalah-Masalah Hukum, Universitas Diponegoro, Vol. 53 No. 2
- Grace Sharon, 2020, *"Teori Wewenang dalam Perizinan"*, Justiciabelen, Vol. 3 No. 1
- Kevindra Ramadhani, 2017 *'Penertiban Kendaraan Bermotor yang Bukan Bernomor Polisi Lokal dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Kota Pangkalpinang)'* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung,)
- R. Agus Abikusna, 2019 *"Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah"* . Vol. 13 No. 1
- Stout HD, de Betenissen van de wet, 2014 dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung
- Parikesit, 2021, *"Penerapan Asas Legalitas (Legaliteit Beginsel/Wetmatigheid van Bestuur) dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan"*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18 No. 4
- Prabowo, A. 2021 *Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kontribusinya Terhadap PAD*. Jurnal Administrasi Publik.
- Wahyudi, T. 2022 *Mutasi Kendaraan dan Implikasinya Terhadap Pajak Daerah*. Jurnal Kebijakan Transportasi
- Luh Putuh Candri Dewi, 2022 *"Sumber Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia di Sekolah Dasar"* Jurnal

Kewarganegaraan Vol.6 No 2 September

Faridah, H 2025 “*Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Bingkai Otonomi Daerah*”. Jurnal Ilmiah Hukum DE`JURE

D. Internet

AJNN, "Hentikan Truk asal Aceh, Rombongan Gubernur Sumut Minta Plat BL Ganti ke BK", diakses 28 September 2025, melalui <https://www.ajnn.net/news/hentikan-truk-asal-aceh-rombongan-gubernur-sumut-minta-plat-bl-ganti-ke-bk/index.html>

DJKN Kemenkeu, "Ketidakpastian Hukum Pembeli Lelang Kendaraan Rampasan", melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak/baca-artikel/18116/>

Ejurnal Kampus Akademik, "Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan...", melalui <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/download/1006/879/3956>

detik.com, "*Razia Kendaraan Pelat BL di Sumut, Bobby: Bukan Sentimen*", diakses 29 September 2025, melalui <https://www.detik.com/sumut/berita/d-8135965/razia-kendaraan-pelat-bl-di-sumut-bobby-bukan-sentimen>

detik.com, "7 Pernyataan Bobby Soal Heboh Minta Kendaraan Ganti Pelat BL ke BK/BB", diakses 1 Oktober 2025, melalui <https://www.detik.com/sumut/berita/d-8138956/7-pernyataan-bobby-soal-heboh-minta-kendaraan-ganti-pelat-bl-ke-bk-bb>

Gramedia Literasi, "Pengertian Kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli", melalui <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>

Hukumonline.com, "Pemda Dorong Kendaraan Operasional Gunakan Plat Nomor Lokal untuk Tingkatkan Pendapatan Daerah", diakses 26 agustus 2025 melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemda-dorong-kendaraan-operasional-gunakan-plat-nomor-lokal-untuk-tingkatkan-pendapatan-daerah-lt68ad652e775d1/>

IDN Times Sumut, "Stop Plat BL di Langkat, Bobby: Giliran Kita kok Malah Heboh", diakses 29 September 2025, melalui <https://sumut.idntimes.com/news/sumatera->

[utara/stop-plat-bl-di-langkat-bobby-giliran-kita-kok-malah-heboh-00-f4z9n-273x1z](https://pid.kepri.polri.go.id/prosedur-pelayanan-tanda-nomor-kendaraan-bermotor-tnkb/)

Polisi Daerah Kepulauan Riau, "Prosedur pelayanan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB)", PID POLDA KEPRI, 24 September 2019, diakses dari <https://pid.kepri.polri.go.id/prosedur-pelayanan-tanda-nomor-kendaraan-bermotor-tnkb/>